



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025, untuk menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dokumen Perubahan Renja ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong beserta program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon koreksi, saran dan masukan dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Banua Lawas, Agustus 2025

Kepala Kecamatan Banua Lawas,


WANDI. S. Sos. M. AP
Pembina Tk. I
NIP. 19680705 198903 1 016

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika penulisan	I-5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2025	II-7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaaan	II-7
2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025	II-7
2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025..	II-14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-25
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	II-26
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 III-36
 BAB IV PENUTUP	 IV-50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD 2025	II-8
Tabel 2.2 Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025	II-9
Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Sampai Triwulan II Tahun 2025.....	II-15
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025.....	II-27
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan konsekuensi dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, serta sebagai wujud implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025. Renja Tahun 2025 telah disusun pada tahun 2024 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, hasil pengendalian pelaksanaan renja menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor P- 668/Kecamatan Banua Lawas.P2E/050/07/2022 tentang Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025, bahwa SKPD melakukan penyesuaian terhadap Renja sehubungan dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Selain berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2025, Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009



- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
 15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);



16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 29).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

2. Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas Tahun 2025

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Banua Lawas sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Kecamatan Banua Lawas dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 6 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Kecamatan Banua Lawas dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 12 kegiatan.



2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada di renja Kecamatan Banua Lawas dengan APBD tahun 2025, jumlah sub kegiatan yang ada di renja sebanyak 29 sedangkan sub kegiatan yang ada di APBD sebanyak 29 sub kegiatan.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Anggaran Renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 sebesar Rp.4.455.744.930,- sedangkan anggaran Kecamatan Banua Lawas berdasarkan APBD 2025 adalah sebesar Rp .4.799.821.930,-. Terdapat selisih anggaran antara APBD dengan Renja 2025 sebesar Rp.344.077.000,-.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Kecamatan
Banua Lawas Tahun 2025 dengan APBD 2025

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2025
1	Program	6	6
2	Kegiatan	12	12
3.	Sub Kegiatan	29	29
4	Pagu Anggaran	Rp4.455.744.930	Rp. 4.799.821.930

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2. Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja dan APBD Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025		APBD 2025	
								Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Anggaran
(1)						(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7		UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01	KECAMATAN									
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B	3.797.133.081	B	2.247.469.266
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 dokumen	23.700.000	8 dokumen	9.550.000
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	2 dokumen	1.500.000	2 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000
7	01	01	2	01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah di kumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	1 Data	13.200.000	1 dokumen	10.950.000
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 dokumen	2.947.907.000	20 dokumen	3.436.191.000
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang / Bulan	2.944.907.000	18 Orang/Bulan	3.433.191.000
7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	1.500.000	18 Dokumen	1.500.000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	279.342.893	100%	245.888.775
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	6.004.375	4 Paket	6.004.375
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	34 paket	32.950.872	34 paket	32.950.872
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	12.960.646	4 paket	27.463.528
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	24 Dokumen	6.000.000	24 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	514 OH	221.427.000	400 OH	173.470.000
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat dan Perlengkapan Yang dibeli	45 Unit	173.703.854	43 Unit	163.759.150



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	36 Unit	82.140.258	34 Unit	72.195.665
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	9 Unit	91.563.596	9 Unit	91.563.596
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	239.609.334	100%	255.774.534
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	31.200.000	48 Laporan	31.200.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	208.409.334	12 Laporan	224.574.534
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	41` Unit	132.870.000	38 Unit	132.870.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit	106.760.000	12 Unit	106.760.000
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29 unit	26.110.000	29 unit	26.110.000
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	85%	268.494.700	85%	177.418.680
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	234.864.700	1 Laporan	157.918.680



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	02	2	01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	1 Laporan	234.864.700	1 Laporan	157.918.680
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi	2 Kegiatan	33.630.000	2 Kegiatan	19.500.000
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	33.630.000	12 Laporan	19.500.000
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	85%	90.939.442	80%	95.199.442
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang di bina dan diberdayakan	15 Desa	25.200.000	15 Desa	13.200.000
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	25.200.000	15 Laporan	13.200.000
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dibina dan diberdayakan	15 PKK	65.739.442	15 PKK	81. 999.442



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	1500 keluarga	65.739.442	15 PKK	81.999.442
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	77.270.000	100%	56.050.000
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	77.270.000	12 Patroli Terpadu	56.050.000
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	77.270.000	12 Laporan	56.050.000
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	85%	178.172.515	80%	180.885.046
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Laporan	178.172.515	12 Laporan	180.885.046



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	166.622.515	200 Orang	170.835.046
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	11.550.000	12 Dokumen	10.050.000
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85%	43.735.192	75%	34.335.192
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	43.735.192	15 Desa	34.335.192
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	15 Dokumen	23.100.000	15 Dokumen	14.100.000
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	20.635.192	1 Dokumen	20 235.192



Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2025 dan APBD 2025 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 100 persen. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaruinya indikator dan target Renja 2025 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian besar masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banua Lawas sampai triwulan II tahun 2025



Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Sampai Triwulan II Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7						UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01					KECAMATAN							
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	4.165.723.87	B	1.553.629.878	40%	B	
7	01	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	23.700.000	8 dokumen	0	0%	5 dokumen	
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	1.500.000	2 dokumen	0	0%	1 dokumen	
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1.500.000	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	1 dokumen	0	0%	0	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.500.000	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	1 dokumen	0	0%	0	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1.500.000	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	
7	01	01	2	01	09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah di kumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	13.200.000	1 Data	0	0%		
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	3.436.191.000	20 dokumen	1.369.254.307	47,69%	9 dokumen	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan pegawai	3.433.191.000	18 org/Bulan	1.369.254.307	47,67%	7 bulan	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	2 Laporan	0	0%	2 dokumen	
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semes teran SKPD	1.500.000	18 Laporan	0	0%	-	
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.342.893	100%	94.069.510	72.71%	70%	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6.004.375	4 Paket	5.282.500	99,93%	5 Komponen	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32.950.872	34 paket	29.693.130	78,02%	27 item	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	27.463.528	4 paket	11.305.100	78,25%	16.632 lembar	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan yang disediakan	6.000.000	24 Dokumen	668.780	24,58%	6 bulan	
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	173.470.000	400 OH	47.120.000	68,42%	200 OK	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat dan Perlengkapan Yang dibeli	163.759.150	43 Unit	16.409.100	89,83 %	3 Unit	
7	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	72.195.665	34 unit	16.409.100	89,83%	3 unit	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	91.563.596	9 unit				
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	255.774.534	100%	71.193.896	35,88%	50%	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	31.200.000	48 Laporan	9.275.396	27,60%	6 bulan	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	224.574.534	12 bulan	61.918.500	37,56%	6 bulan	
7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	132.870.000	41 Unit	62.644.645	61,25%	22 Unit	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	106.760.000	12 Unit	46.390.350	68,65%	5 unit	
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26.110.000	29 unit	9.295.295	43,60%	15 unit	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/dTriwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	177.418.680	85%	489.528.525	38,97%	40%	
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	157.918.680	1 Laporan	481.761.025	38,36%	1 Laporan	
7	01	02	2	01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	157.918.680	1 Laporan	481.761.025	38,36%	1 Laporan	
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitas	19.500.000	2 Kegiatan	7.767.500	17,73%	3 Kegiatan	
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.500.000	12 Laporan	7.767.500	17,73%	3 Kegiatan	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	95.199.442	85%	-	-	-	
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang di bina dan diberdayakan	13.200.000	15 Desa	-	-	-	
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	13.200.000	15 Desa	-	-	-	
7	01	03	2	06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dibina dan diberdayakan	81.999.442	15 PKK				
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	81.999.442	1500 Keluarga				



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, dan Kenyamanan	56.050.000	100%	8.855.800	29,21%	50%	
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	56.050.000	12 Patroli Terpadu	8.855.800	29,21%	6 Patroli Terpadu	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.050.000	12 Laporan	4.500.000	27,27%	5 Kegiatan	
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	180.885.046	85%	10.215.500	25,12%	40%	
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	180.885.046	1 Laporan	10.215.500	25,12%	1Laporan	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	170.835.046	200 Orang	10.215.500	25,12%	1 Laporan	
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.050.000	12 Dokumen				
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.335.192	85%	12.514.800	30,96%	35%	
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.335.192	15 Desa	12.514.800	30,96%	7 Desa	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2025			Catatan
								Keuangan (Rp)	Kinerja (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Kinerja (%)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	14.100.000	15 Dokumen	5.200.000	28,39%	7 Dokumen	
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Data Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 235.192	1 Data	7.314.800	33,09%	7 Dokumen	

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Banua Lawas sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (formulir evaluasi terlampir). Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Kecamatan Banua Lawas telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.623.104.317,- atau sekitar 44,08 persen dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV, diantaranya yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan :
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
3. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Banua Lawas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).
3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.
4. Pelayanan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).



5. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.
6. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Mengkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
10. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Banua Lawas menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banua Lawas, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.
2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas diantaranya dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Berdasarkan data pada tabel 2.3, secara umum pelaksanaan sebagian besar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian kinerja sampai dengan triwulan II dan memerlukan tindak lanjut adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat rincian belanja yang masuk pada sub kegiatan yang tidak tepat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pemindahan belanja dari sub kegiatan satu ke sub kegiatan lainnya yang sesuai.
2. Masih terdapat hambatan terkait upaya pemenuhan laporan penunjang nilai AKIP, diantaranya belum tepat waktunya pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar dari dilakukannya evaluasi kinerja. Selain itu pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dan rencana aksi juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Banua Lawas, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada tahun 2025, dapat diidentifikasi beberapa isu yang berkembang dan harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Banua Lawas dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil SKPD Kecamatan Banua Lawas untuk membantu dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada masing-masing Kasi ada yang tidak memiliki staf.
2. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga capaian kinerja individual masih relatif rendah. Tingkat SDM aparat Kecamatan Banua Lawas khususnya staf yang masih terbilang rendah juga minimnya penguasaan komputer dan internet menyebabkan kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan, serta kurangnya kesadaran aparat pemerintahan di Kantor Kecamatan Banua Lawas dalam tertib administrasi.
3. Kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan yang berkompeten.
4. Masih rendahnya tanggung jawab aparatur pemerintahan desa terhadap pelaksanaan tugas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Banua Lawas juga memiliki beberapa faktor kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Banua Lawas diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.
2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.
3. Suasana kerja di Kecamatan Banua Lawas yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (*team work*).
4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Banua Lawas yang baik.



Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Banua Lawas adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Kecamatan Banua Lawas berdasarkan BPS menempati angka kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 85,6 %, sehingga untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, perlu adanya upaya – upaya dengan memberikan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan instansi terkait.

2. Bidang Pemerintahan

Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Banua Lawas untuk selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan

4. Bidang Pertanian

Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Banua Lawas. Para pengembang mulai melirik tanah pertanian di Kecamatan Banua Lawas untuk dijadikan perumahan

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2025 adalah **“Penanganan Kesehatan dan Percepatan Pemulihan Ekonomidalam Rangka Menciptakan SDM yang Tangguh”** dengan 5 prioritas daerah dan 15 sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. RKPD 2025 dalam hal ini mengalami perubahan salah satunya dari segi rumusan program/kegiatan/subkegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan rancangan perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan perubahan rencana kerja Kecamatan Banua Lawas. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD	Nilai AKIP	B	2.447.176.215	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD	Nilai AKIP	B	2.447.176.215	
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 Dokumen	9.550.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 Dokumen	9.550.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dokumen	1.275.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dokumen	1.500.000	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dokumen	1.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dokumen	1.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	1.907.925.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	1.907.925.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	1 dokumen	1.906.050.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	1 dokumen	1.906.050.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.275.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.275.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	600.000	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.126.651	Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	203.126.651	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33.264 lembar	14.446.321	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33.264 lembar	14.446.321	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 bulan	2.720.347	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	12 bulan	2.720.347	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	403 OK	142.615.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	403 OK	142.615.000	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Alat Yang dibeli	3 Unit	18.266.594	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Alat Yang dibeli	3 Unit	18.266.594	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli	3 Unit	18.266.594	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli	3 Unit	18.266.594	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	192.735.163	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	192.735.163	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33.600.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.135.163	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.135.163	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	38 Unit	115.572.807	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	38 Unit	115.572.807	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	80.874.769	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	80.874.769	
	Rancangan RKPD					Hasil Analisis					



N O						Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SKPD	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	1.334.320.270	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SKPD	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	1.334.320.270	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	1.240.520.270	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Laporan	1.240.520.270	
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SKPD	Terfasilitasinya laporan penyelenggaraan kegiatan MTQ	1 Laporan	1.240.520.270	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SKPD	Terfasilitasinya laporan penyelenggaraan kegiatan MTQ	1 Laporan	1.240.520.270	



N O	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitas	4 Kegiatan	93.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitas	4 Kegiatan	93.800.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitas	4 Kegiatan	93.800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitas	4 Kegiatan	93.800.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SKPD	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	75%	21.461.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SKPD	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	75%	21.461.800	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	15 Desa	21.461.800	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	15 Desa	21.461.800	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	15 Desa	21.461.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	15 Desa	21.461.800	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SKPD	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	30.321.220	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SKPD	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	30.321.220	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SKPD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	30.321.220	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SKPD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	30.321.220	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	11 Kegiatan	16.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	11 Kegiatan	16.500.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SKPD	Terfasilitasinya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kegiatan	13.821.220	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SKPD	Terfasilitasinya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kegiatan	13.821.220	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	30.970.679	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Laporan	30.970.679	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	1 Laporan	30.970.679	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	1 Laporan	30.970.679	



No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	SKPD	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	35.876.260	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	SKPD	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	35.876.260	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	35.876.260	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	35.876.260	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi	15 Dokumen	15.884.460	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi	15 Dokumen	15.884.460	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa	SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi	15 Dokumen	19.991.800	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa	SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi	15 Dokumen	19.991.800	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan sebagai berikut :

**Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

Kegiatan : 1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Sub Kegiatan:
- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan:
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rumah Tangga



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas Tahun 2025

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Sub Kegiatan : a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

Kegiatan : 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opeasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program 2 : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan : 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan: a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Kegiatan : 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan
Sub Kegiatan: a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Program 3 : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
Sub Kegiatan : a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas Tahun 2025

Program 4 : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan: a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan
b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Program 5 : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan: a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Program 6 : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan: a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Rencana kerja dan pendanaan pada setiap program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1. dibawah ini.



Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)							Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)					Catatan Penting					
			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025										
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
7							UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01						KECAMATAN													
7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKPD	Nilai AKIP	B	2.225.609.134	Pendapatan Asli Daerah	100%	5.751.286.737	Pendapatan Asli Daerah	Nilai AKIP	B	7.419.903.003	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan n, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 dok	9.550.000	Pendapatan Asli Daerah	100%	9.550.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disusun	8 dok	9.550.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 doK	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah	9 doku men	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah yang disusun	2 doK	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 doK	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah		1.275.000		Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 doK	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dok	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1.500.000		Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	1 dok	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD	SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dok	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah		1.275.000		Jumlah dokumen DPA yang disusun	1 dok	1.275.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dok	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1.500.000		Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 dok	1.500.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1.000.000		Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1.000.000		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1 dok	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2022			Perubahan Renja 2025				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen Penatausah aan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun -	20 dokum en	1.729.875.000	PAD	20 DOK	1.789.565,000	PAD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 DOK	1.907.925.000	PAD	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	14 Bulan	1.728.000.000	PAD	14 Bulan	1.787.690.000	PAD	Jumlah tersedianya pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai	14 Bulan	1.906.050.000	PAD	
7	01	01	2	02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 Dok	1.275.000	PAD	2 Dok	1.275.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	2 Dok	1.275.000	PAD	
7	01	01	2	02	03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula n/Semesteran SKPD yang disusun	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dok	600.000	PAD	4 Dok	600.000	PAD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dok	600.000	PAD	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Persentase Terpenuhinya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100%	164.986.088	Penda patan Asli Daera h	100%	129.381.651	Pendapa tan Asli Daerah	Persentase Terpenuhinya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100%	203.126.651	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/pener angan bangunan kantor yang disediakan	5 kompon en	5.286.171	Penda patan Asli Daera h	5 komp onen	5.286.171	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 komponen	5.286.171	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	Penda patan Asli Daera h	51 item	38.058.812	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	51 item	38.058.812	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Digandakan	33.264 lembar	14.446.321	Penda patan Asli Daera h	33.264 lemba r	14.446.321	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Digandakan	33.264 lembar	14.446.321	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundanga n yang disediakan	803 eksempl ar	2.720.347	Penda patan Asli Daera h	803 eksem plar	2.720.347	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	803 eksemplar	2.720.347	Pendapa tan Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Se telah Perubahan)				Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2022			Perubahan Renja 2025				
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas -	500 OK	104.474.437	PAD	403 OK	68.870.000	PAD	Jumlah orang kali (OK) yang melaksanakan perjalanan dinas	520 OK	142.615.000	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah Alat Yang dibeli	3 Unit	18.078.754	Pendap atan Asli Daerah	3 Unit	18.078.754	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah Alat Yang dibeli	3 Unit	18.266.594	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli	3 Unit	18.078.754	Pendap atan Asli Daerah	3 Unit	18.078.754	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang dibeli	3 Unit	18.266.594	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	193.145.391	Penda patan Asli Daera h	100%	198.435.163	Pendapa tan Asli Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100%	192.735.163	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33,600,000	PAD	12 bulan	33.600.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet yang dibayarkan	12 bulan	33.600.000	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.545.391	PAD	12 bulan	164.835.163	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	159.135.163	Pendapat an Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2022			Perubahan Renja 2025				
									Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	01	2	09		Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	38 Unit	109.973.901	Pendap atan Asli Daerah	38 Unit	102.270.858	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	38 Unit	115.572.807	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendar aan dinas/o perasio nal yang dipelih ara	9 Unit	75.275.863	Pendap atan Asli Daerah	9 Unit	67.572.820	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operas ional yang dipelihara	9 Unit	80.874.769	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	Pendap atan Asli Daerah	27 unit	21.317.335	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah peralatan yang dipelihara	27 unit	21.317.335	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	Pendap atan Asli Daerah	2 unit	13.380.703	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang dipelihara	2 unit	13.380.703	Pendapat an Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
									Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	02					PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	SKPD	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyaraka tan	80%	1.413.101.146	Pendap atan Asli Daerah	80%	1.299.822.219	Pendapat an Asli Daerah	Persentase Pelayanan Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan	80%	1.334.320.270	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	02	2	01			Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SKPD	Jumlah laporan penyelenggar an kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Lap	1.357.197.146	Pendap atan Asli Daerah	1 Lap	1.256.022.219	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Lap	1.240.520.270	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	02	2	01	01		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SKPD	Terfasilitasiny a laporan penyelenggar an kegiatan MTQ	1 Lap	1.357.197.146	Pendap atan Asli Daerah	1 Lap	1.256.022.219	Pendapat an Asli Daerah	Terfasilitasinya laporan penyelenggaraan kegiatan MTQ	1 Lap	1.240.520.270	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	02	2	02			Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi	4 Keg	55.904.000	Pendap atan Asli Daerah	4 Keg	43.800.000	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah Kegiatan Yang di Fasilitasi	4 Keg	93.800.000	Pendapat an Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
									Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	02	2	02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SKPD	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitas	4 Keg	55.904.000	Pendapatan Asli Daerah	80%	43.800.000	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Kegiatan Yang di dilaksanakan dan di Fasilitas	80%	93.800.000	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	SKPD	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	75%	49.936.800	Pendapatan Asli Daerah	75%	23.061.800	Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan kinerja aparatur, kapasitas aparatur dan tata kelola kewilayahan desa	75%	21.461.800	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	03	2	01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	15 Desa	49.936.800	Pendapatan Asli Daerah	15 Desa	23.061.800	Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pemerintah Desa yang dibina / diberdayakan	15 Desa	21.461.800	Pendapatan Asli Daerah	
7	01	03	2	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SKPD	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	15 Desa	49.936.800	Pendapatan Asli Daerah	15 Desa	23.061.800	Pendapatan Asli Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	15 Desa	21.461.800	Pendapatan Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode						Urusan/ Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
								Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
									Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SKPD	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	69.035.200	Pendap atan Asli Daerah	100%	30.321.220	Pendapat an Asli Daerah	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan	100%	30.321.220	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SKPD	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	69.035.200	Pendap atan Asli Daerah	12 Patrol i Terpadu	30.321.220	Pendapat an Asli Daerah	Jumlah Patroli Terpadu Tingkat Kecamatan	12 Patroli Terpadu	30.321.220	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SKPD	Terfasilitasi nya Kegiatan Forkopimca	11 Kegiatan	16.500.000	Pendap atan Asli Daerah	11 Kegiatan	16.500.000	Pendapat an Asli Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Forkopimca	11 Kegiatan	16.500.000	Pendapat an Asli Daerah	
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SKPD	Terfasilitasinya a Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Keg	38.713.980	Pendap atan Asli Daerah	12 Kegiatan	13.821.220	Pendapat an Asli Daerah	Terfasilitasinya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kegiatan	13.821.220	Pendapat an Asli Daerah	



**Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025**

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
									Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
										Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	05					PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	SKPD	Persentase dokumen penyelengga raan pemerintah an yang disusun tepat waktu	80%	68.095.679	Penda patan Asli Daerah	80%	40.670.679	Pendapa tan Asli Daerah	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	80%	30.970.679	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	05	2	01			Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	SKPD	Jumlah laporan penyelenggara n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Lap	68.095.679	Penda patan Asli Daerah	1 Lap	40.670.679	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Lap	30.970.679	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	05	2	01	01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SKPD	Terfasilitasin ya Kegiatan HUT RI dan Pemerintah an Desa	1 Lap	68.095.679	Penda patan Asli Daera h	1 Lap	40.670.679	Pendapa tan Asli Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan HUT RI dan Pemerintahan Desa	1 Lap	30.970.679	Pendapa tan Asli Daerah	



Perubahan Renja Kec. Banua Lawas
Tahun 2025

Kode							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i Detail	Rencana Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)						Rencana Tahun 2025 (Setelah Perubahan)				Catatan Penting	
									Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Renja 2025			APBD 2025			Perubahan Renja 2025				
										Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Targe t Capai an Kiner ja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	SKPD	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	68.396.260	Penda patan Asli Daerah	75%	40.421.260	Pendapa tan Asli Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	35.876.260	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	06	2	01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	68.396.260	Penda patan Asli Daerah	15 Desa	40.421.260	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah Pemerintah Desa yang di bina dan di awasi	15 Desa	35.876.260	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	06	2	01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi	15 Dok	34.300.200	Penda patan Asli Daera h	15 Dok	18.314.460	Pendapa tan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi	15 Dok	15.884.460	Pendapa tan Asli Daerah	
7	01	06	2	01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayguna an Aset Desa	SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayguna an Aset Desa yang difasilitasi	15 Dok	34.096.060		15 Dok	22.106.800		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaygunaan Aset Desa yang difasilitasi	15 Dok	19.991.800		



BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas ini berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Banua Lawas Tahun 2025-2026, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong



c Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banua Lawas , Agustus 2025

CAMAT



H. SUWANDI, S.Sos. M. AP

Pembina Tk. I

NIP. 19680705 198903 1 016

